

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kualifikasi syahbandar biasanya diatur oleh hukum nasional. Namun, secara umum, syahbandar diharapkan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam bidang maritim, termasuk pemahaman yang baik tentang peraturan keselamatan maritim dan prosedur penerbitan dokumen kapal seperti SPB dan Syahbandar akan meninjau berbagai dokumen dan persyaratan yang diajukan oleh kapal sebelum memberikan persetujuan untuk berlayar. Dokumen yang diajukan biasanya mencakup Surat Ukur, Sertifikat Kelaikan Berlayar, dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Syahbandar harus memastikan bahwa kapal memenuhi semua persyaratan keselamatan dan peraturan maritim sebelum menerbitkan SPB.
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran aktivitas berlayar tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar melibatkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana pelayaran. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan kompleksitas pembuatan SPB, di mana seringkali kebutuhan uang pelican menjadi faktor penentu kepatuhan. Kondisi ini menciptakan dorongan untuk mengabaikan persyaratan pembuatan surat persetujuan berlayar (SPB), seiring dengan persepsi bahwa melanggar aturan berlayar tanpa surat persetujuan berlayar (SPB) lebih mudah, cepat, dan ekonomis.

## B. Saran

1. Syahbandar sebaiknya memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang relevan dalam bidang maritim. Hal ini dapat mencakup gelar atau sertifikasi dalam keamanan maritim, manajemen pelabuhan, atau bidang terkait lainnya dan Syahbandar harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi maritim nasional dan internasional yang berkaitan dengan keselamatan kapal dan lingkungan dan Syahbandar harus memegang teguh prinsip kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Mereka juga harus menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya, tidak terlibat dalam praktik-praktik korupsi atau penyuapan.
2. Pelaku tindak pidana pelayaran diharapkan untuk menyusun dokumen-dokumen dengan lengkap, guna menghindari risiko bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Penting untuk memastikan bahwa kapal memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, dan hindari membawa barang yang dilarang guna menghindari pelanggaran peraturan. Kesadaran terhadap konsekuensi hukum, termasuk sanksi penjara, seharusnya mendorong pelaku untuk tidak mengulangi tindakan yang melanggar aturan. Selain itu, perlu ada kesadaran bahwa tindakan semacam itu dapat menyebabkan kerugian negara yang signifikan, berdampak pada ekonomi negara. Untuk menegakkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, diperlukan pemahaman dan kesadaran yang kuat dari masyarakat.

